

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG
JL LINGKAR LUAR BARAT 10A, CENGKARENG TIMUR
JAKARTA BARAT 11730

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Jakarta Cengkareng pada tahun anggaran tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Biro Perencanaan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, setiap instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Jakarta Cengkareng menuju terwujudnya *good governance*. LAKIN juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja KPP Pratama Jakarta Cengkareng.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS), sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah, KPP Pratama Jakarta Cengkareng juga menetapkan sasaran strategis dan kontrak kinerja KPP Pratama Jakarta Cengkareng tahun 2024.

Dalam melaksanakan sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi untuk dapat menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Visi tersebut mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan. Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut selanjutnya telah dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana kerja tersebut berfungsi sebagai rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang merupakan implementasi pelaksanaan tugas strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Situasi dan kondisi perekonomian yang fluktuatif serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis menjadi tantangan bagi KPP Pratama Jakarta Cengkareng dalam pelaksanaan penghimpunan penerimaan negara. Namun, komitmen untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menjadi motivasi KPP Pratama Jakarta Cengkareng untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Jakarta Cengkareng pada tahun 2024.

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,



(Ditandatangani secara elektronik)
Hadi Susilo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, kinerja pendapatan negara tahun 2024 mampu mencapai Rp2.842,5 T atau 101,4% dari target APBN 2024 dan tumbuh positif 2,1% yoy. Penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 T atau 100,5% dari target, tumbuh 3,5% yoy. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Tujuan KPP Pratama Jakarta Cengkareng sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis adalah mendukung terealisasinya penerimaan pajak (PPH, PPN, Pasal 21 dan pajak lainnya) tahun 2024 sebesar Rp3.189.477.031.000,00.

B. Gambaran Organisasi

KPP Pratama Jakarta Cengkareng adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

1. Tugas

Dalam kedudukannya tersebut, KPP Pratama Jakarta Cengkareng mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah kewewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Jakarta Cengkareng menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelayanan perpajakan;

- f. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pembetulan ketetapan pajak; dan
- l. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi KPP Pratama Jakarta Cengkareng adalah:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cengkareng memiliki wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Cengkareng dengan luas wilayah berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 adalah 2.654,02 Ha atau 26,54 km² yang meliputi 6 (enam) kelurahan yaitu Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke, Kapuk, Cengkareng Timur, dan Cengkareng Barat, 87 Rukun Warga (RW), 1.063 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk 576.216 jiwa, yang terdiri dari 291.890 jiwa penduduk laki-laki dan 284.290 jiwa penduduk perempuan.

Di tahun 2024 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng adalah 361.912 Wajib Pajak. Atas seluruh Wajib Pajak tersebut, sektor dominan yang berkontribusi pada penerimaan KPP Pratama Jakarta Cengkareng adalah PPN dan PPh dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, disusul dengan bidang konstruksi di urutan kedua.

Aspek kepegawaian yang mendukung operasional KPP Pratama Jakarta Cengkareng di tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1
Sekretaris	1
Bendaharawan	1
Kepala Subbag	1
Kepala Seksi	9
Account Representative	35
Pelaksana	30
Juru Sita	3
Pemeriksa Pajak Madya	2
Pemeriksa Pajak Muda	5
Pemeriksa Pajak Pertama	3
Pemeriksa Pajak Penyelia	1
Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	1
Pemeriksa Pajak Pelaksana	8
Penyuluh Pajak Ahli Muda	4
Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	1
Asisten Penyuluh Pajak Mahir	2
Asisten Penyuluh Pajak Terampil	2
Asisten Penilai Pajak Terampil	1
Total	111

C. Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Jakarta Cengkareng menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun tantangan yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Cengkareng tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. target penerimaan pajak yang direvisi sehingga naik cukup signifikan;
2. Wajib Pajak yang berjumlah banyak dengan tingkat kepatuhan yang cukup rendah;
3. komposisi penerimaan pajak dari sangat banyak Wajib Pajak dengan kontribusi kecil-sedang, sehingga jumlah Wajib Pajak yang harus dilakukan pengawasan sangat banyak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: "menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan."

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, jangka pendek atau jangka panjang. Oleh karena itu sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Cengkareng memiliki tujuan jangka pendek sebagai berikut:

- a. melampaui target penerimaan pajak sebesar Rp3.189.477.031.000,00;
- b. meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak;
- c. meningkatkan citra aparat dengan berpedoman kepada nilai-nilai organisasi; dan
- d. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 110% atau lebih.

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah:

- a. memberikan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan pelanggan dan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak dan kewajibannya; dan
- b. mewujudkan Wajib Pajak yang mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi sehingga tercapai *tax ratio*, *tax coverage ratio* dan *compliance ratio* yang diharapkan.

4. Kebijakan

Demi tercapainya tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Cengkareng mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi setiap pegawai:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. meningkatkan edukasi dan penyuluhan perpajakan;
- c. meningkatkan pengawasan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
- d. menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan pemeriksaan; dan
- e. melaksanakan penagihan aktif dalam rangka penegakan hukum perpajakan.

5. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program yang ditetapkan untuk masing-masing kebijakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng adalah:

- a. peningkatan sarana informasi perpajakan;
- b. penyelesaian seluruh layanan tepat waktu;
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas edukasi dan penyuluhan perpajakan;
- d. meningkatkan pengawasan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak melalui aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dengan memanfaatkan data internal dan data eksternal;
- e. melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah dengan kunjungan lapangan;
- f. meningkatkan kualitas pemeriksaan;
- g. melaksanakan penagihan aktif bekerjasama dengan berbagai pihak.

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Cengkareng telah dilakukan dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Jakarta Cengkareng harus menjadi acuan sekaligus landasan

penyusunan strategi. Visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan menjadi Sasaran Strategis (SS). Tujuan strategis lalu dipetakan dalam peta strategi.

BSC yang digunakan di KPP Pratama Jakarta Cengkareng menerapkan tiga perspektif, yaitu: *strategic outcome (stakeholders perspective dan customers perspective)*, *strategic driver (internal process perspective)*, dan *learning and growth perspective*. Tiga perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 20 sasaran sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%

8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2024

Berikut disajikan capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Cengkareng Tahun 2024:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				104.42
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104.42
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.35%	100.35
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	110.00	110.00
Customer Perspective				100.83
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101.40
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.35%	100.35
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	102.83%	102.83
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.27%	100.27
Internal Process Perspective				116.76
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113.47
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	106.93%	106.93
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	118.41%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117.93
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	113.79%	113.79
7	Penegakan hukum yang efektif			112.40
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	118.92%	118.92
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	106.54%	120.00

7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
Learning & Growth Perspective				116.46
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112.91
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.50	117.50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	93.82	110.38
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.78	110.87
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				109.80

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap IKU KPP Pratama Jakarta Cengkareng tahun 2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis SS-1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

Indikator Kinerja Utama

KPP-1: Persentase realisasi penerimaan pajak; dan

KPP-2: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

KPP Pratama Jakarta Cengkareng mengemban misi menghimpun penerimaan Negara pada tahun 2024 memperoleh capaian sebesar Rp3.200.577.176.817,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3.189.477.031.000,00, atau 100,35% dari target yang ditetapkan. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai sebesar 110,00. Detail penerimaan pajak tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN		CAPAIAN
		2024	2023	
A. Pajak Penghasilan	1,182,677,120,000	1,153,137,604,296	922,535,707,887	97.50%
1. PPh NON MIGAS	1,182,677,120,000	1,153,180,642,900	922,535,582,012	97.51%
1.1 PPh Pasal 21	200,843,785,000	189,174,962,377	163,777,064,749	94.19%
1.2 PPh Pasal 22	64,761,904,000	62,949,045,159	55,004,096,379	97.20%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	215,106,921,000	209,085,503,478	136,711,156,776	97.20%
1.4 PPh Pasal 23	72,852,843,000	70,813,437,501	55,795,550,634	97.20%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	73,673,237,000	81,267,515,868	60,464,538,252	110.31%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	304,601,969,000	296,075,300,541	244,321,761,803	97.20%

1.7 PPh Pasal 26	25,938,672,000	25,212,579,439	3,718,760,176	97.20%
1.8 PPh Final	224,897,789,000	218,602,298,537	202,628,329,843	97.20%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0.00%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	0	114,323,400	0.00%
2. PPh MIGAS	0	-43,038,604	125,875	0.00%
2.1 PPh Minyak Bumi	0	-43,038,604	0	0.00%
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0.00%
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0.00%
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	0	125,875	0.00%
B. PPN dan PPnBM	2,004,103,926,000	2,046,342,993,052	1,540,731,521,011	102.11%
1. PPN Dalam Negeri	1,361,297,196,000	1,389,988,406,225	1,064,914,524,484	102.11%
2. PPN Impor	642,507,996,000	656,049,734,836	454,665,968,238	102.11%
3. PPnBM Dalam Negeri	43,761,000	44,683,157	-3,455,217	102.11%
4. PPnBM Impor	246,508,000	251,703,801	4,690,126,000	102.11%
5. PPN Lainnya	8,465,000	8,465,033	618,321	100.00%
6. PPnBM Lainnya	0	0	0	0.00%
7. PPN DN DTP	0	0	16,463,739,185	0.00%
8. PPNBM DTP	0	0	0	0.00%
C. PBB dan BPHTB	0	655,980,289	584,965,385	0.00%
1. Pendapatan PBB	0	0	584,965,385	0.00%
a. PBB Perdesaan	0	0	0	0.00%
b. PBB Perkotaan	0	0	0	0.00%
c. PBB Perkebunan	0	0	0	0.00%
d. PBB Kehutanan	0	0	0	0.00%
e. PBB Pertambangan Minerba	0	0	0	0.00%
f. PBB Migas	0	0	0	0.00%
g. PBB Pertambangan	0	0	0	0.00%
h. PBB lainnya	0	655,980,289	584,965,385	0.00%
2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0.00%
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	2,303,793,326	0.00%
1. PPh Pasal 21	0	0	749,210,623	0.00%
2. PPh Pasal 22	0	0	0	0.00%
3. PPh pasal 22 Impor	0	0	0	0.00%
4. PPh Pasal 23	0	0	0	0.00%
5. PPh Pasal 25/29 OP	0	0	0	0.00%
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	0	3,925,368	0.00%
7. PPh Pasal 26	0	0	0	0.00%
8. PPh Final	0	0	1,550,657,335	0.00%
9. PPh Non Migas lainnya DTP	0	0	0	0.00%
JUMLAH D	0	0	2,303,793,326	0.00%
E. Pajak Lainnya	2,695,985,000	440,599,180	118,556,287	163.04%
1. Bea Meterai	0	0	8,249,000	0.00%
2. Penjualan Benda Meterai	0	0	0	0.00%

3. PTLL	0	0	0	0.00%
4. Bunga Penagihan PPh	19,707,000	3,220,707	110,307,287	163.04%
5. Bunga Penagihan PPN	2,676,278,000	437,378,473	0	163.04%
6. Bunga Penagihan PPnBM	0	0	0	0.00%
7. Bunga Penagihan PTLL	0	0	0	0.00%
8. PIB	0	0	0	0.00%
9. PPN Batu Bara	0	0	0	0.00%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	3,189,477,031,000	3,200,577,176,817	2,466,274,543,896	100.35%

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam tercapainya IKU tersebut adalah:

- a. meningkatkan jumlah WP terdaftar melalui DSE;
- b. melakukan visit ke alamat terdaftar/lokasi usaha/lokasi baru;
- c. melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak melalui WA/email;
- d. mengirimkan Imbauan/surat menyurat ke lokasi WP;
- e. mengirimkan SP2DK atas potensi yang belum dipenuhi oleh WP;
- f. mengajukan usulan DPP yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis SS-2: Tingkat Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Indikator Kinerja Utama

KPP-3: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Dari 86.377 Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan, target Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2024 adalah 68.289. Pada tahun 2024, capaian IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah sebesar 102,83% dengan total SPT yang masuk sebesar 60.634 SPT.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam tercapainya IKU tersebut adalah:

- a. pembentukan Satgas Kepatuhan SPT yang melibatkan seluruh pegawai di setiap seksi/subbag dan fungsional pemeriksa pajak;
- b. menjadikan tema "Kepatuhan SPT" ada dalam setiap fungsi dengan cara mengecek pelaporan SPT Tahunan pada setiap pemrosesan PAP di pelayanan, serta pada kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penagihan, dan SUKI;
- c. membuat pojok pajak di kelurahan, mall, pusat keramaian, dan kantor Wajib Pajak dengan jumlah yang signifikan;
- d. membuat WA Blast terkait imbauan pelaporan SPT Tahunan;
- e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah (kelurahan/RT/RW); dan

- f. menerbitkan Surat Teguran, Surat Imbauan, melakukan visit, menghubungi Wajib Pajak, mengundang pengurus Wajib Pajak Strategis agar segera melakukan pelaporan SPT Tahunan.

KPP-4: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Persentase jumlah wajib pajak strategis dan kewilayahan yang membayar mencapai 100,35%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah melakukan pemantauan Dafnom STP secara optimal dan menindaklanjuti DSPE dan Data Matching secara optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam tercapainya IKU tersebut adalah:

- a. melakukan pemantauan Dafnom STP;
- b. menindaklanjuti DSPE dan Data Matching dengan menerbitkan imbauan/SP2DK;
- c. reminder pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menghubungi Wajib Pajak, misal melalui WA Blast atau secara personal;
- d. melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan terkait pemberian edukasi Wajib Pajak baru (terkait pelaporan dan pembayaran).

3. Sasaran Strategis SS-3: Tingkat Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Indikator Kinerja Utama

KPP-5: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Persentase jumlah wajib pajak strategis dan kewilayahan yang membayar mencapai 105,91%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya iku tersebut adalah:

- a. *canvassing* tindak lanjut *shadow economy*;
- b. intensifikasi 100 Wajib Pajak besar;
- c. mengusulkan DPP yang akan menghasilkan penerimaan dari PKM untuk pengawasan;
- d. membuat KKA Wajib Pajak risiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan;
- e. melakukan analisa terhadap SP2DK outstanding yang akan diusulkan pemeriksaan lebih awal dari *timeline* seharusnya;
- f. memperbanyak KKA yang diproduksi oleh Fungsional Pemeriksa Pajak;
- g. melakukan manajemen restitusi;
- h. melakukan suspend akun PKP.

4. Sasaran Strategis SS-4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

Indikator Kinerja Utama

KPP-6: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditargetkan mencapai 74.00% dan realisasi yang dicapai sebesar 88.80%. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam tercapainya IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi secara luring, dengan diadakan secara *one-on-one* dan *one-to-many*;
- b. Edukasi secara daring, dengan diadakan secara *one-on-one* dan *one-to-many*.

KPP-7: Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 tercapai sebesar 106,93%. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam tercapainya IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. selalu memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan SOP secara tepat waktu, ramah, berintegritas, adaptif, nyaman, dan *good governance* baik yang diberikan secara luring maupun daring untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak;
- b. petugas pelayanan/penyuluh secara aktif meminta Wajib Pajak untuk mengikuti survei kepuasan setelah mendapat pelayanan.

5. Sasaran Strategis SS-5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Indikator Kinerja Utama

KPP-8: Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Cengkareng menghasilkan indeks capaian sebesar 118,41%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah:

- a. penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran tahun berjalan;
- b. penelitian kesesuaian pemanfaatan kebijakan insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak;
- c. pembuatan imbauan pemenuhan pembayaran masa pajak;
- d. penerbitan teguran penyampaian SPT Masa;
- e. penelitian data *matching* pada Approweb.

6. Sasaran Strategis SS-6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

Indikator Kinerja Utama

KPP-9 : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). KPP Pratama Jakarta Cengkareng berhasil merealisasikan capaian IKU sebesar 120%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapai IKU tersebut adalah:

- a. menindaklanjuti atas data dan/atau keterangan yang terbit;
- b. memanfaatkan data pemicu, data penguji, data pihak ketiga;
- c. memilih data alket atas kualitas nilai dan validitas;
- d. melakukan kunjungan dan konseling terhadap wajib pajak terkait pemenuhan pembayaran atas SP2DK *Outstanding* yang telah diterbitkan; dan
- e. melakukan kunjungan dan konseling terhadap wajib pajak terkait pemenuhan pembayaran atas SP2DK yang terbit.

KPP-10 : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Pada IKU ini, KPP Pratama Jakarta Cengkareng dapat merealisasikan sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapai IKU tersebut adalah:

- a. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan menuntaskan semua STP yang harus diterbitkan;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk dafnom STP dan penerbitan STP oleh *Account Resperentative* pada aplikasi Approweb.

KPP-11: Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu telah mencapai 113.79% dari target IKU yang telah ditetapkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian tersebut adalah:

- a. memastikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak selalu tepat waktu dengan selalu berkordinasi dengan seksi terkait;
- b. melakukan penyiapan bahan baku pemeriksaan yang optimal;
- c. melakukan kinerja pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang optimal agar mencapai nilai rapor kinerja yang baik.

7. Sasaran Strategis SS-7: Penegakan hukum yang efektif

Indikator Kinerja Utama

KPP-12 : Persentase Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian ditargetkan mencapai 100% dan telah terealisasi sebesar 118,92%. Capaian ini diperoleh dari kegiatan pemeriksaan sebesar 120% dan penilaian sebesar 117,29%. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

- a. memperkuat dasar hukum pemeriksaan, memperbaiki kualitas temuan pemeriksaan;
- b. melakukan sharing session dan pembahasan untuk kasus pemeriksaan yang sama di internal FPP;
- c. memperbaiki kemampuan komunikasi, agar WP segera melunasi;
- d. mempercepat penyelesaian pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus;
- e. meningkatkan kualitas pengujian pemeriksaan;
- f. meminta data ke otoritas terkait untuk sumber penetapan PBB;
- g. melakukan kunjungan lapangan ke objek yang dilakukan pengalihan. Mengonfirmasi kebenaran akan transaksi yang dilaporkan ke WP. Meminta bukti pendukung atas transaksi yang dilakukan seperti PPJB/AJB, rekening koran dsb;
- h. mempercepat penyelesaian pemeriksaan khusus;

KPP-13: Persentase Tingkat Efektivitas Penagihan

Target yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi capaian sebesar 106,54%, sehingga capaian IKU tingkat efektivitas penagihan telah mencapai 120%. Kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah:

- a. mempersuasif WP untuk segera melunasi ketetapan yang harus dibayar;
- b. melakukan pemblokiran dan pencarian aset Wajib Pajak yang belum disita Aparat Penegak Hukum;
- c. mempersuasif WP untuk mengikuti program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA).
- d. mengusulkan penghapusan tunggakan pajak

KPP-14: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Cengkareng mengirimkan 1 (satu) usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan telah disetujui oleh Kanwil DJP Jakarta Barat sehingga capaian IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah tercapai sebesar 100%. Untuk dapat mencapai target IKU tersebut, KPP Pratama Jakarta Cengkareng telah menyeleksi dengan cermat dan memilih Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan agar usulan tersebut dapat disetujui dan mencapai target IKU.

8. Sasaran Strategis SS-8: Data dan Informasi yang berkualitas.

Indikator Kinerja Utama

KPP-15: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Capaian atas realisasi Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 156,75% dari target yang sudah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai IKU adalah:

- a. melakukan KPDL berdasarkan kewilayahan;
- b. melakukan kegiatan pengamatan;
- c. melakukan penelitian atas pelaporan SPT Wajib Pajak;
- d. memastikan Laporan penyediaan data potensi perpajakan dari seksi pengawasan ke seksi PKD sesuai jangka waktu (5 hari kerja).

9. Sasaran Strategis SS-9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja Utama

KPP-16: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Data Hasil *Assessment Center* (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 menunjukkan jumlah pegawai KPP Pratama Jakarta Cengkareng yakni 30 peserta telah memenuhi Standar Kompetensi. Kegiatan kebintalan SDM telah dilakukan secara optimal. Capaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah memperoleh capaian optimal sebesar 117,5%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam tercapainya IKU tersebut adalah:

- a. melakukan monitoring dan membuat daftar normatif pegawai yang dapat mengikuti ujian kompetensi pada periode yang dilakukan ujian;
- b. mempersiapkan kelengkapan ujian kompetensi dengan baik;
- c. memberikan kesempatan bagi pegawai yang akan mengikuti Ujian Kompetensi agar dapat mempersiapkan diri untuk belajar pada H-1 pelaksanaan ujian;

- d. membagikan informasi materi-materi yang dapat dipejalari pegawai sebelum mengikuti ujian;
- e. mengingatkan pegawai untuk menyelesaikan modul Studia/e-learning KLC tepat waktu;
- f. menginput Jamlat Pelajaran dari Surat keterangan Jumlah dari diklat dan KLC para pegawai ;
- g. melakukan kegiatan kebintalan dan membuat laporan kegiatan dengan tepat waktu.

KKP-17: Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks capaian atas Penilaian Integritas Unit telah mencapai sebesar 93.82% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga capaian IKU indeks penilaian integritas unit adalah sebesar 110,38%. Adapun kegiatan yang diambil dalam rangka mencapai IKU ini adalah:

- a. selalu memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan SOP secara tepat waktu, ramah, berintegritas, adaptif, nyaman, dan *good governance* baik yang diberikan secara luring maupun daring untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak;
- b. memastikan Wajib Pajak yang akan dijadikan responden survei dapat dihubungi; dan
- c. memberikan informasi terkait survei kepada Wajib Pajak jauh hari sebelum tenggat waktu.

KKP-18: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Indeks capaian atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko telah mencapai sebesar 99,78% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaian IKU adalah sebesar 110,87%. Adapun kegiatan yang diambil dalam rangka mencapai IKU ini adalah:

- a. melakukan kegiatan Imbauan Manajemen Kinerja Pegawai setiap triwulan tepat waktu;
- b. menyiapkan rapat DKRO, laporan DKRO yang termasuk integrasi MR dengan rapat DKRO;
- c. membuat laporan pemantauan MR;
- d. permintaan kepada Pemilik Proses Bisnis untuk penyusunan profil Risiko awal Tahun.

10. Sasaran Strategis SS-10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja Utama

KPP-19: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 telah melebihi target sehingga capaian IKU-nya adalah 120%. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah:

- a. melakukan belanja dengan semaksimal mungkin sesuai dengan timeline belanja yang sudah ditentukan oleh pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. memastikan RPD (rencana penarikan dana);
- c. memastikan kesesuaian rencana dan realisasi;

- d. memastikan RPD sesuai rencana (deviasi kecil);
- e. memastikan pengisian capaian output setiap bulan dan tepat waktu;
- f. mencetak SPM di SAKTI sesuai target pencairan; dan
- g. membuat Laporan Pertanggungjawaban.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan dibiayai dari sumber DIPA. Secara keseluruhan, dana dalam pos-pos yang tertuang dalam DIPA telah mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan. Pagu Anggaran KPP Pratama Jakarta Cengkareng tahun 2024 adalah Rp6.423.333.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp6.135.143.411,00 atau penyerapan sebesar 95,51%. Dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang, yang menempati jumlah belanja paling besar adalah kategori Belanja Barang yaitu sebesar Rp5.113.167.411,00. Penyerapan Belanja Pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp1.021.976.000,00 dan tidak ada Belanja Modal pada tahun 2024 (Rp0,00).

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas KPP Pratama Jakarta Cengkareng dilaksanakan dalam 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator kinerja Utama (IKU) telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan analisis, pencapaian kinerja IKU Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Cengkareng sebesar 109,80% dan pencapaian penerimaan sebesar 100,35% di mana sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Untuk mengatasi masalah/hambatan di masa mendatang, perlu dilakukan penetapan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua unit/seksi pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng serta unit dan instansi lainnya di lingkungan DJP maupun luar DJP;
- b. meningkatkan kualitas SDM dalam hal kompetensi pelaksanaan tugas dan integritas moral;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran; dan
- d. melaksanakan kegiatan penggalan potensi dari awal tahun dengan mengoptimalkan pemanfaatan data yang ada dalam penggalan potensi, visit lapangan dalam rangka *profiling* dan pengamatan terhadap usaha Wajib Pajak, dan meningkatkan efektifitas tindakan penagihan.

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Cengkareng selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.